



**GOVERNOR JAMBI**  
**GOVERNMENT OF JAMBI**  
**NUMBER 931 /KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2020**

**ABOUT**

**ESTABLISHMENT OF MINIMUM WAGES IN TANJUNGPINANG WEST DISTRICT  
YEAR 2021**

**GOVERNOR JAMBI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menyatakan bahwa Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota guna untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh agar hidup layak, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Pinang Barat Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);



11. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 883/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2021;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;

2. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 17 November 2020 tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 sebesar Rp2.769.040,5 (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh rupiah koma lima sen) perbulan.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 8-12-2020



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Bupati Tanjung Jabung Barat;
5. Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Kapolresta Tanjung Jabung Barat;
8. Dandim 0419/Tanjung Jabung;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
13. Dewan Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.